

SKRIPSI
PERAN DPD PARTAI GOLKAR DALAM PELAKSANAAN
PENDIDIKAN POLITIK MENJELANG PILKADA SERENTAK 2020 DI
KOTA MATARAM

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana (SI)



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MATARAM

2021

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PERAN DPD PARTAI GOLKAR DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN
POLITIK MENJELANG PILKADA SERENTAK 2020 DI KOTA MATARAM



Disusun dan diajukan oleh :

NURUL FAJERI

NIM : 217130060

PROGRAM STUDI

ILMU PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian Skripsi

Pembimbing I

Drs. H. Darmansyah, M.Si
NIDN. 0008075914

Pembimbing II

Hidayatullah, S.IP., M.IP
NIDN. 0809038902

Mengetahui,
Ketua program studi
Ilmu Pemerintahan

Awatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

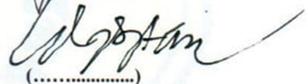
**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PERAN DPD PARTAI GOLKAR DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN
POLITIK MENJELANG PILKADA SERENTAK 2020 DI KOTA MATARAM**

Disusun Dan Diajukan Oleh

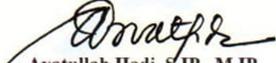
**NURUL FAJERI
NIM : 217130060
PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN**

Telah Dipertahankan Dalam Ujian Skripsi Pada Tanggal 03 Agustus 2021 Dan Dinyatakan
Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Tim Penguji

- | | | |
|---|------|---|
| 1. <u>Drs. H. Darmansyah, M.Si</u>
NIDN. 0008075914 | (PU) |  |
| 2. <u>Hidayatullah, S.IP., M.IP</u>
NIDN. 0809038902 | (PP) |  |
| 3. <u>Drs. H. Mustamin H. IDRIS, MS</u>
NIDN. 0031126484 | (PN) |  |

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM maupun di Perguruan Tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplak, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Mataram, 03 Agustus 2021

Mahasiswa,



Nurul Fajeri

Nim: 217130060



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-041906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Fajeri
NIM : 217130060
Tempat/Tgl Lahir : Maronge, 12 Oktober 1998
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FKIPOL
No. Hp : 085 937 766 880
Email : nurulfajeri1210@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Peran OPD Partai Golkar dalam pelaksanaan pendidikan
politik menjelang pilkada serentak 2020 di kota Mataram

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, Selasa, 21 September 2021
Penulis



Nurul Fajeri
NIM. 217130060

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.uin-ummata.ac.id> E-mail : pc@ummata.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Fajeri
 NIM : 217130060
 Tempat/Tgl I lahir : Maronge, 12 oktober 1998
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Fakultas : Fisipol
 No. Hp/Email : 085 237 766 880 / nurulFajeri1210@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Peran DPO Partai Golkar dalam pelaksanaan pemilihan
Politik menjelang pilkada serentak 2020 di Kota Mataram

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, seksa, 21 september 2021
 Penulis


 Nurul Fajeri
 NIM. 217130060

Mengetahui,
 Kepala UPT Perpustakaan UMMAT


 Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

“Tak Perlu Khawatir Soal Hasil. Allah Tau Prosesmu Dan Allah Pasti Selalu Adil”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang pertama dari segalanya...

Sujud dan syukurku kepada Allah SWT berkat rahmat, cinta dan kasih sayangnya yang telah memberikan hambanya ini kesempatan, kesehatan, dan mempercayai untuk menitipkan segelintir ilmu serta memberikan nikmat yang begitu besar tentang kehidupan dan cinta. Atas karunianya serta kemudahan yang telah diberikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya skripsi kecilku ini kepada inspirasi terbesarku kepada :

Ibu, Ibu, dan Ibu

Ibu Darmawan perempuan sehebat Siti Hajar, orang yang sangat kusayangi dan kucintai, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, pengorbanan dan selalu menyemangati serta do`a tulus yang selalu mengiringi setiap langkah dihidup anak kecilmu ini.

Nenek (Maemunah) dan Kakek (Muslim Saeran)

Dua orang hebat yang selalu memotivasi, menyemangati dan memberikan do`a untuk keberhasilanku ini. Terima kasih atas kasih sayang dan segala kekuatan yang tulus selama ini, semoga suatu saat nanti perempuan kecil ini dapat membalas semua budi baik yang telah kalian diberikan.

Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram

Tempatku memperoleh ilmu dan merangkai mimpi-mimpi untuk jalan menuju kesuksesan di masa depan.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan Skripsi yang berjudul:

“PERAN DPD PARTAI GOLKAR DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK MENJELANG PILKADA SERENTAK 2020 DI KOTA MATARAM” dapat di selesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk melakukan penelitian guna mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Perjalanan panjang yang telah penulis lalui dalam proses penyusunan Skripsi ini. Banyak tantangan dan hambatan yang penulis hadapi untuk menyelesaikan Skripsi ini. Penulis menyadari bahwa proses penulisan tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses perjalanan Akademik penulis maupun penyusunan Proposal ini terutama kepada :

1. Bapak Drs. H. Arsyad Abd.Gani, M.,Pd Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali,M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi S.IP M.,IP Selaku Kepala Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Bapak Drs H. M. Darmansyah, M.Si Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan masukan dan arahan kepada peneliti.
5. Bapak Hidayatullah, S.IP.,M.IP Selaku Dosen Pembimbing Kedua yang selalu memberikan gambaran serta banyak membantu dalam penyelesaian proposal dan skripsi ini.
6. Bapak/ibu para Karyawan dan staf TU di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah membantu dalam pelayanan akademik selama menjalani pendidikan.
7. Malaikat tak bersayapku Ibu Darmawan yang senantiasa mendo`akan yang terbaik buat putri tercintanya, serta memberikan semangat yang begitu luar biasa.
8. Kakek dan Nenek serta keluarga besar yang sangat saya sayangi dan cintai. Terimakasih selama ini kalian banyak membantu secara moral dan material, dan mendorong semangat untuk keluar dari keadaan terpuruk untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan yang selalu setia menemani dan saling membantu dalam menyelesaikan skripsi ini Septia Widiarni, Rizky Hidayatiningsih, Wisnu Arya Pamungkas, M. Rizky Alby Peradana , Muhammad Husnaini, Indri Septi Samudra.
10. Teman tersayang yang selalu memberikan semangat dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini Lili Indriyani, Silda Meisoraya, Richo, Aad, Andi, Olis, Oza, Ayak, Lana.

11. Untuk teman-teman Angkatan 2017 terkhusus kelas B Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tentu belum sempurna seperti yang diharapkan, Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran, serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin.

Mataram, 03 Agustus 2021

Penulis

Nurul Fajeri

Nim: 217130060



PERAN DPD PARTAI GOLKAR DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK MENJELANG PILKADA SERENTAK 2020 DI KOTA MATARAM

ABSTRAK

Di zaman demokrasi sekarang ini, pendidikan politik sangat diperlukan dikarenakan tuntutan demokrasi itu sendiri. Sebagai salah satu pilar negara partai politik memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan politik yaitu memberikan pendidikan politik kepada setiap warga negara dan warga negara juga berhak menerima pendidikan politik tersebut agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan khusus tersebut pelaksanaan fungsi partai politik dalam hal pelaksanaan pendidikan politik menjadi suatu yang sangat penting. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan peran DPD Partai Golkar kota Mataram dalam pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat serta apa saja indikator dalam pelaksanaan pendidikan politik.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang berupa hasil wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa peran DPD partai Golkar kota Mataram dalam memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat menjelang pilkada serentak 2020 bisa dikatakan sudah berperan atau sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai partai politik. Dalam proses pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD partai Golkar kota Mataram dengan memperhatikan materi dan metode pendidikan, masih berorientasi pada penguatan lembaga internal partai yang diarahkan sebagai upaya untuk memenangkan pilkada dan konsolidasi partai. Selain itu adapun indikator pendidikan politik yaitu pendidikan politik sebagai pembentuk karakter bangsa, sebagai pembangun kesadaran berpolitik, sebagai pembinaan kader parpol serta sebagai penanaman ideologi.

Kata kunci : Peran, Partai Politik, Pendidikan Politik.

**THE DPD OF GOLKAR PARTY'S ROLE IN IMPLEMENTING THE
POLITICAL EDUCATION OF THE 2020 SIMULTANEOUS ELECTIONS IN
MATARAM CITY**

ABSTRACT

In today's democratic era, political education is essential because of the demands of democracy itself. As one of the pillars of the state, political parties function as a means of political education, namely providing political education to every citizen and citizens are also entitled to receive political education so that they become citizens who are aware of their rights and obligations. It can be concluded that to achieve this specific goal, the implementation of the functions of political parties in terms of the implementation of political education is crucial. Therefore, this study was conducted to describe the role of the DPD Golkar Party in Mataram city in the implementation of political education for the community and the indicators in the implementation of political education. This research used a qualitative approach. Sources of data used in this study are primary data in interviews, field observations and documentation. According to the findings of interviews and observations, the Golkar party's DPD in Mataram has played a role or has carried out its obligations and functions as a political party in imparting political education to the community ahead of the 2020 simultaneous regional elections. By paying attention to the materials and methods of teaching, the DPD of the Golkar party of Mataram city is still focused on building the party's internal structures to win elections and consolidate the party. Political education as a shaper of the nation's character, as a builder of political awareness, as a cadre of political parties, and as an ideology planting are other markers of political education.

Keywords: Role, Political Party, Political Education.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
KEPALA
DPP P3B
UMMAH M. Pd
NIDN. 0803048601

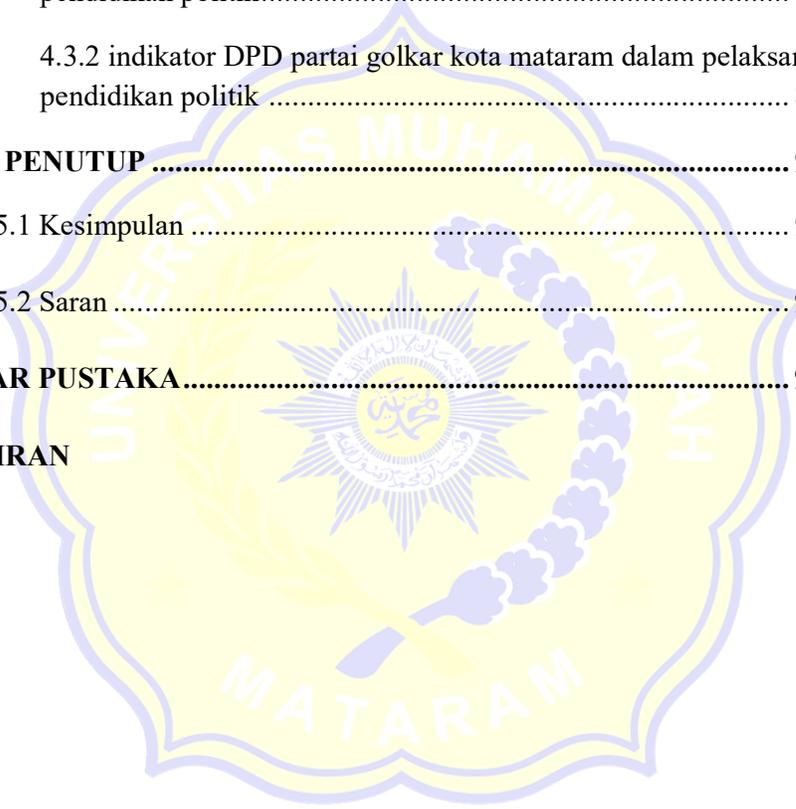


DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTO	iv
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Landasan Teori.....	16
2.2.1 Demokrasi	16
2.2.2 Peran	22
2.2.3 Pemilihan Umum.....	26
2.2.4 Pemilihan Kepala Daerah.....	28
2.2.5 Politik.....	29
2.2.6 Partai Politik.....	32

2.2.7 Pendidikan Politik.....	37
2.2.8 Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik.....	46
2.3 Kerangka Berpikir	49
2.4 Definisi Konseptual	50
2.5 Definisi Operasional	53
BAB III. METODELOGI PENELITIAN.....	55
3.1 Jenis Penelitian	55
3.2 Lokasi Penelitian	55
3.3 Fokus Penelitian	56
3.4 Sumber dan Jenis Data.....	56
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	57
3.6 Teknik Analisa Data	58
3.7 Keabsahan Data.....	60
BAB IV PEMBAHASAN.....	62
4.1 Gambran Umum Lokasi Penelitian	62
4.1.1 kondisi geografis dan kondisi administrasi	62
4.1.2 kondisi penduduk.....	63
4.2 DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Mataram	63
4.2.1 sejarah DPD partai golongan karya (golkar)	
kota mataram	63
4.2.2 visi dan misi partai golongan karya (golkar).....	65
4.2.3 tujuan dan fungsi partai Golongan Karya (golkar).....	66

4.2.4 letak Geografis DPD partai golongan karya (golkar) kota mataram	67
4.2.5 struktur organisasi DPD partai golongan karya (golkar) kota mataram	67
4.3 Hasil dan Pembahasan	71
4.3.1 Aspek peran DPD partai golkar kota mataram dalam memberikan pendidikan politik.....	71
4.3.2 indikator DPD partai golkar kota mataram dalam pelaksanaan pendidikan politik	83
BAB V PENUTUP	91
5.1 Kesimpulan	91
5.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 3.1 Nama Informan.....	57
Tabel 4.1 Batas Wilayah Kota Mataram	62
Tabel 4.2 Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan Dan Desa Tiap Kecamatan Di Kota Mataram Tahun 2012	63
Tabel 4.3 Nama Ketua Umum Dpd Partai Golkar Kota Mataram.....	65
Tabel 4.4 Angka Golput Dalam Pilkada Kota Mataram	73
Tabel 4.5 Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Kota Mataram	75
Tabel 4.6 Surat Keputusan Kpu Kota Mataram.....	80
Tabel 4.7 Pendidika Politik Secara Tidak Langsung Melalui Wacana Berita.....	82
Tabel 4.8 Jadwal Pendidikan Politik Bagi Calon Anggota Dprd Dan Kader Partai Golkar Kota Mataram.....	86
Tabel 4.9 Jadwal Pendidikan Karakter Dan Bela Negara Bagi Kader Partai Golkar Kota Mataram	88
Tabel 4.10 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota Mataram Tahun 2020	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....49



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan politik merupakan rangkaian kegiatan bertujuan membentuk dan membudayakan orientasi politik pribadi berupa konsep-konsep politik, pengetahuan dan persepsi politik, agar masyarakat dapat memahami isu-isu politik dan sikap politik. Jika disamakan dengan partai politik, maka pendidikan politik dapat diartikan sebagai upaya untuk secara sadar dan sistematis mengubah segala persoalan yang berkaitan dengan perjuangan partai agar mereka sadar akan pentingnya peran dan fungsinya. , Serta hak dan kewajibannya sebagai pribadi atau warga negara.

Di zaman demokrasi seperti sekarang ini, pendidikan politik sangat di perlukan dikarenakan tuntutan demokrasi itu sendiri. Sebab demokrasi sendiri bukan hanya membuat partai politik di suatu Negara menjadi stabil, namun juga memberikan harapan baru. Pendidikan politik itu tidak hanya ditujukan melalui perubahan-perubahan sikap politik seseorang saja, tetapi bisa juga untuk mendukung usaha-usaha untuk memperbaharui institusi kemasyarakatan maupun lembaga politik (Rosyid, 2019)

Kerangka politik Indonesia telah memasukkan partai politik sebagai salah satu pilar pendukung demokrasi. Keberadaan partai politik di negara demokrasi tidak terlepas dari peran dan fungsi partai itu sendiri. Kemampuan utama suatu partai adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk

melaksanakan program-program berdasarkan ideologi tertentu (Ramlan Surbakti 2010: 149)

Pendidikan politik dipandang sebagai siklus pertukaran antara instruktur, seperti pemerintah, sekolah, partai politik dan peserta didik dalam pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai, norma, dan symbol politik yang dianggap hebat dan ideal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yaitu tujuan umum partai politik adalah: 1). Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2). Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3). Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 4). Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan khusus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik yaitu meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan, memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan

khusus partai politik sebagaimana telah diatur dalam undang-undang tersebut, pelaksanaan pendidikan politik menjadi suatu hal yang amat penting.

Selanjutnya Pasal 34 ayat (3a) tentang Partai Politik menjelaskan bahwa: dalam pelaksanaan pendidikan politik, partai politik mendapatkan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Bantuan tersebut diutamakan untuk pelaksanaan pendidikan bagi anggota partai politik dan masyarakat.

Dalam masyarakat saat ini, partisipasi dan tanggung jawab penuh dari masyarakat tidak dapat terjadi secara otomatis, hal ini disebabkan oleh beberapa hal berikut: Pertama, pemilu saat ini hanya rutinitas lima tahunan. Masyarakat seolah-olah menjadi konsumen atau aktor penting. Ikut serta dalam pemilu Suara para calon kepala daerah, rakyat telah mendapat berbagai perhatian, sehingga para kombatan yang mengikuti pemilu telah meraih mimpi kemenangan hidup yang lebih baik. Kedua, selain itu, struktur masyarakat modern terlalu rumit, dan tingkat sosial dan politik saling terkait dan sulit dipahami oleh orang awam, sehingga orang tidak tahu bagaimana berpartisipasi dalam politik (Kartono, 2009: cet 3. 27).

Kemudian ditambah lagi pilkada serentak 2020 dilaksanakan di era pandemi *covid-19* yang dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru

mengingat proses pelaksanaan pilkada dilakukan dengan melibatkan dan mengumpulkan orang dalam jumlah banyak.

Point-point diatas mengadakan perkara yang sangat penting menjelang diperhatikan oleh defile politik, memikirkan masih banyak masyarakat yang minim pengetahuan tentang politik di tambah lagi masyarakat sedang beradaptasi dengan keadaan di era pandemi *covid-19*. Partai politik memiliki kinerja pendidikan politik terhadap masyarakat, saat ini partai politik bukan tidak mungkin memberi perhatian pada masyarakat saat kampanye kemudian setelah itu diupayakan tidak ada evaluasi dari pemegang politik itu.

Selain itu pemilu juga salah satu indikator penting untuk sistem demokrasi, karena masyarakat dapat ikut andil langsung dalam menentukan pilihan politik mereka terhadap proses pemerintahan dan kenegaraan. Dari berbagai persoalan, Pilkada serentak 2020 tentu menjadi tantangan yang lebih besar khususnya partai politik dalam memberikan pendidikan politik karena, pelaksanaan pilkada serentak dilaksanakan ditengah era pandemi *covid-19*. Agar pilkada serentak 2020 di era pandemic dapat terlaksana dengan baik diperlukan kesungguhan dan kerjasama dari seluruh elemen baik dari segi pemerintah, partai politik maupun masyarakat.

Pelaksanaan pendidikan politik dimasa pandemi *covid-19* telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 tahun 2020, yaitu dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup. Membatasi jumlah peserta yang hadir sesuai dengan kapasitas ruangan atau gedung tertutup yang memperhitungkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter antara peserta.

Menerapkan protocol kesehatan pencegahan dan pengendalian *covid-19*. Dan wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *covid-19* pada wilayah setempat. Pelaksanaan pendidikan politik juga diupayakan melalui media daring sehingga tidak memicu kerumunan yang nantinya akan menjadi klaster baru dalam penyebaran *covid-19*. Pendidikan politik di era pandemic dapat dilakukan secara daring dengan memberikan pendidikan politik melalui webinar atau sosialisasi online secara efektif dan efisien maupun kampanye *door to door* ke masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Menjelang pilkada serentak tahun 2020 di Kota Mataram partai Golkar NTB telah menetapkan bakal pasangan calon wali Kota Mataram yaitu H. Mohan Roliskana (HMR) dan TGH. Mujiburrahman yang memang merupakan kader partai Golkar. Menurut Rino Rinaldi anggota DPRD Kota Mataram, Dia menghimbau seluruh kader partai Golkar tetap semangat dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, bergerak sesuai koridor dan tidak berlebihan dalam menyikapi dinamika politik yang berkembang di masyarakat. Inti partai Golkar sudah bergerak dalam rel, dan konsisten dalam memberikan pendidikan politik ke masyarakat (Rino Rinaldi : Golkar Solid Dukung HMR | Lombok Post (jawapos.com))

Pendidikan politik yang diberikan oleh partai Golkar Kota Mataram bertujuan untuk memenangkan pertarungan dalam pilkada dengan konsisten dalam memberikan pendidikan politik ke masyarakat sehingga masyarakat paham bahwa pentingnya sikap partisipatif terhadap politik. Berdasarkan latar

belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
**“Peran DPD Partai Golkar Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik
Menjelang Pilkada Serentak 2020 Di Kota Mataram”.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran DPD partai Golkar dalam memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat Kota Mataram menjelang PILKADA serentak tahun 2020?
2. Apa saja indikator DPD partai Golkar dalam pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat di Kota Mataram menjelang PILKADA serentak tahun 2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan peran DPD partai Golkar Kota Mataram dalam pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat.
2. Untuk mengetahui indikator DPD partai Golkar dalam pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat di Kota Mataram menjelang PILKADA serentak tahun 2020.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih kepada pihak akademisi sebagai sumber bacaan serta untuk menambah wawasan sebagai

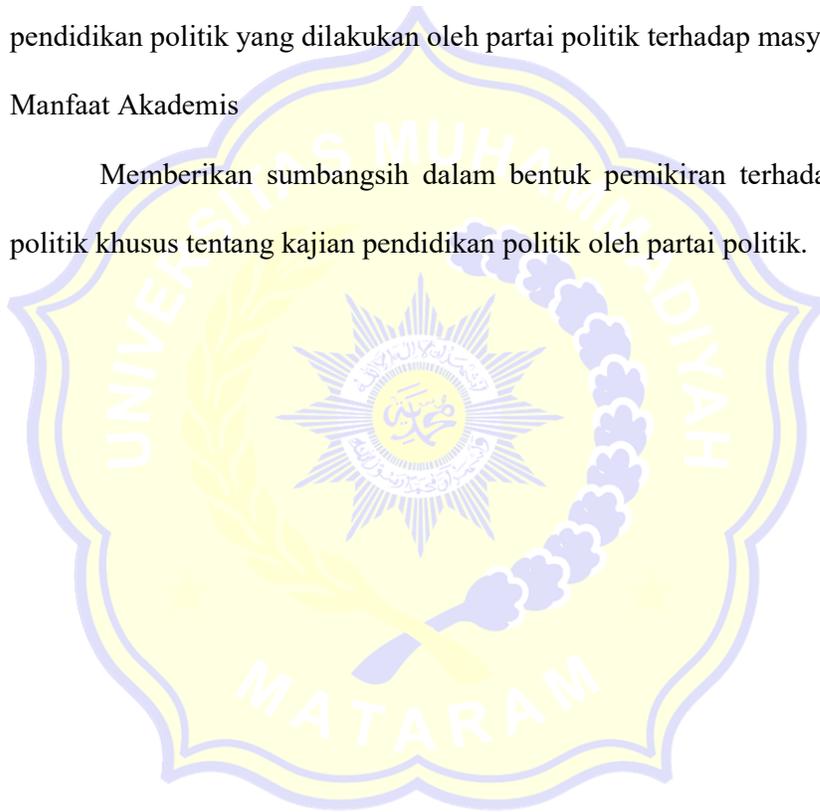
bahan penelitian selanjutnya bagi mahasiswa atau peneliti di dalam meneliti masalah yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran, bagi pemerintah, pengurus partai politik, dan dapat dijadikan referensi bagi masyarakat luas sebagai bahan dalam menjawab permasalahan mengenai pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik terhadap masyarakat.

3. Manfaat Akademis

Memberikan sumbangsih dalam bentuk pemikiran terhadap ilmu politik khusus tentang kajian pendidikan politik oleh partai politik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini, terdapat beberapa literature yang akan peneliti jadikan acuan dalam tinjauan pustaka. Dengan tujuan untuk menemukan sisi menarik atau sisi lain dan kegunaan dari penelitian ini. Ada beberapa pustaka yang peneliti temukan yang dapat dijadikan sebagai instrument pembanding dalam melakukan penelitian seberapa jauh peran partai, khususnya partai Demokrat dalam melakukan pendidikan politik di kota Mataram.

Pertama, karya Saputra (2015), penelitian ini berisi tentang bagaimana partai Golkar kota Malang melaksanakan ilmu politik guna meningkatkan politik pemuda kota Malang dan juga menjaga ketahanan wilayah dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya yaitu, peran partai Golkar dalam memberikan pendidikan politik dikota Malang masih terbilang cukup rendah. Ini dikarenakan pembahasan yang dijelaskan oleh partai Golkar dalam penelitian terbilang kurang konseptuan. Penjelasan partai Golkar Malang dalam pemberian pendidikan politik tidak berjalan dengan efektif. Ini mengakibatkan peran partai politik dalam upaya memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang bagaimana hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik tidak dapat tersalurkan dengan baik ke seluruh elemen masyarakat. Hal yang kemudian ditemukan dalam penelitian ini adalah rendahnya kualitas kader

partai politik yang mempunyai tujuan untuk memotivasi kehidupan masyarakat. Implikasinya yaitu peran partai politik dalam pendidikan politik generasi muda terhadap ketahanan politik wilayah berdampak pada rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pembuatan dan pengawasan kebijakan publik.

Kedua, karya Sitepu (2016). Penelitian yang berjudul Peranan Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Yang Berkarakter Terhadap Masyarakat ini menggunakan metode tinjauan literatur (*library research*). Hasil penelitiannya adalah Partai politik mengemban misi luhur untuk melakukan pendidikan politik kepada rakyat. Sebagai pedoman pendidikan nasional, pendidikan dapat meningkatkan pemikiran nasional.

Ketiga, karya Ariestino dan Kusriyah (2017) yang berjudul “Peran Partai Politik didalam melaksanakan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi dan Inisiatif Masyarakat dalam proses pemilu di Kota Semarang” hasil penelitian diatas yaitu peran partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Gerindra kota Semarang sangatlah penting, karena masyarakat dikota Semarang masih belum lebih dari 85% dari jumlah penduduknya memberikan suaranya dalam pemilihan yang dilaksanakan selama ini di kota Semarang, sehingga peranan yang dilakukan oleh partai politik sangat mempengaruhi tingkat peran aktif masyarakatnya dalam memberikan suara dalam pemilihan umum. Pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh tiga partai itu telah mengalami peningkatan atau mengalami keberhasilan dengan

menggunakan cara mereka masing-masing dalam memberikan pendidikan politik. Hal ini terlihat dari tahun 2008 jumlah masyarakat yang memberikan suaranya dalam pilkada sebanyak 681.730 suara pada tahun 2009 pada pemilu legislatif mendapat 776.535 suara dan pada pemilu 2014 mendapatkan suara mencapai 845.955 suara, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Keempat, karya Fadillah (2017) yang berjudul “Pendidikan Politik Oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kota Pekanbaru Tahun 2015-2016” Hasil topik penelitian di atas menunjukkan bahwa pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Nasdem di kota Pekanbaru masih berorientasi pada pendidikan politik internal partai yaitu pendidikan politik bagi anggota dan kader partai seperti sekolah. Pembentukan kader legislatif dan partai. Sementara itu, pendidikan politik masyarakat masih minim dan hanya media massa, media massa, dan media elektronik yang dapat digunakan untuk memberikan pendidikan politik. Masih terdapat berbagai kendala dalam terwujudnya pendidikan politik masyarakat di Pekanbaru. Artinya, para kader atau anggota partai bergantung pada kader partai Nasdem di DPRD Pekanbaru untuk melakukan penangguhan, sehingga banyak anggota partai atau kader yang meyakini kebijakan masyarakat juga dilakukan saat penutupan. Kegiatan pendidikan Kendala lainnya adalah terbatasnya anggaran partai untuk pendidikan politik masyarakat Pekanbaru.

Kelima, karya Sandika (2018) penelitian yang berjudul “Peran PDI Perjuangan Dalam Pendidikan Politik Masyarakat Menjelang Pilkada Mesuji Tahun 2017” Hasil penelitian mereka adalah PDI-P DPC Mesuji melakukan

pendekatan kepada masyarakat melalui berbagai tingkatan integrasi dari DPC cabang hingga DPC cabang, hingga kemudian PDI-P melakukan berbagai kegiatan dan diskusi politik melalui kampanye dan seminar politik. Partai PDI-P menawarkan pendidikan politik kepada berbagai kelompok masyarakat, serta pengusaha kecil, perajin, dan sektor informal. Proses pendidikan dan pembelajaran politik berlangsung secara rutin, namun semua ini masih terkait dengan pendidikan politik yang bernuansa sebelum partai. Untuk kader sendiri, PDI-P Mesuji rutin memberikan pendidikan politik pada kader. Ke depan, kader yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus terlebih dahulu dilatih oleh partai sebelum dapat memimpin cita-cita partai untuk menumbuhkan kearifan politik massa. Bisa dikatakan PDI Perjuangan Mesuji berhasil mendidik dan mensosialisasikan politik kepada masyarakat dan aparatnya. Dampak dari hal tersebut PDI-P Mesuji terus menjadi amanah masyarakat dalam merangkul masyarakat untuk memperbaiki diri.

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yulianto Dwi Saputro (2015)	Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Generasi Muda Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah (studi di DPD II Partai Golongan Karya Kota Malang Jawa Timur Tahun 2009-2014)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai Golkar dalam memberikan pendidikan politik di kota Malang masih terbilang cukup rendah dikarenakan penjelasan partai Golkar dalam memberikan pendidikan politik terbilang tidak konseptual dan tidak berjalan efektif yang mengakibatkan peran dari partai politik tidak tersalurkan.
2	Dra. Elisabeth Sitepu, M.Si (2016)	Peran Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Yang Berkarakter Terhadap	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik mengemban tugas mulia untuk melakukan pendidikan politik kepada

		Masyarakat	masyarakat. Selain itu partai politik memiliki tugas konstitusional yang sangat penting yaitu mempersiapkan calon pemimpin bangsa yang memiliki integritas, dedikasi, dan semangat pengabdian yang tinggi melalui pendidikan politik.
3	Lutter Ariestino dan Sri Kusriyah (2017)	Peran Partai Politik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Dan Inisiatif Masyarakat Dalam Proses Pemilu Di Kota Semarang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pendidikan politik yang dilakukan oleh partai Demokrat, partai Golkar, dan partai Gerindra kota Semarang untuk meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam pemilihan umum telah mengalami peningkatan atau keberhasilan dari tahun ke tahun dengan menggunakan cara mereka masing-masing dalam memberikan pendidikan politik.
4	Ichwan Nur Fadillah (2017)	Pendidikan Politik Oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kota Pekanbaru Tahun 2015-2016	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Nasdem di Kota Pekanbaru masih berorientasi pada pendidikan politik internal partai, dan karena berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran, pendidikan politik di masyarakat masih sangat minim. Partai yang diangkat ke masyarakat untuk pendidikan politik masyarakat Pekanbaru.
5	Aden Sandika (2018)	Peran PDI Perjuangan Dalam Pendidikan Politik Masyarakat Menjelang Pilkada Mesuji Tahun 2017	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dapat dikatakan bahwa peran PDI Perjuangan Mesuji telah memainkan perannya sebagai partai politik komunitas. Bentuk pendidikan politik PDI-P di daerah Mesuji meliputi: pelatihan kepemimpinan, dialog publik, debat terbuka, gerakan dialog, kelompok pengasuhan atau Aliansi dll. Pemantauan, evaluasi dan agitasi strategi pendidikan

			politik PDI-P, promosi dan stimulasi.
--	--	--	---------------------------------------

Berdasarkan beberapa tinjauan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan disusun oleh peneliti memiliki beberapa perbedaan dengan karya ilmiah yang ditulis oleh para peneliti sebelumnya dimana perbedaan judul dari salah satu penelitian yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aden Sandika adalah Peran PDI Perjuangan Dalam Pendidikan Politik Masyarakat Menjelang Pilkada Mesuji Tahun 2017, sedangkan penelitian yang akan diteliti peneliti sekarang adalah ingin mengetahui Peran DPD Partai Golkar Kota Mataram Dalam Pendidikan Politik Masyarakat Menjelang Pilkada Serentak tahun 2020 Di Kota Mataram tahun 2020.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Demokrasi

2.2.1.1 Definisi Demokrasi

Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani “demos” yang berarti rakyat, dan “krator/cratein” yang berarti pemerintahan. Di Athena khususnya, kata "*demos*" umumnya mengacu pada semua orang, tetapi kadang-kadang juga mengacu pada orang-orang biasa atau hanya orang miskin. Istilah demokrasi yang asli terkadang digunakan oleh kaum bangsawan sebagai sindiran untuk mendevalusi sebagian besar rakyat (dalam Yudi Latif, 2011):395). Dalam istilah demokrasi, sistem pemerintahan negara adalah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan kekuasaan tertinggi adalah keputusan bersama rakyat. Rakyat berkuasa

dan pemerintah dan kekuasaan rakyat dijalankan oleh rakyat. Rakyat (Azymuardi, 2012: 110).

Menurut C.F. Strong (dalam Purnama, 2007:4) demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dalam hal mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta melalui cara perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu. Dengan kata lain, negara demokrasi didasari oleh sistem perwakilan yang menjamin kedaulatan rakyat.

Menurut Nurcholis Mdjid, demokrasi bukanlah kata benda, tetapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga *civi society* yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi (Sukron Kamil, 2013). Tujuh norma-norma dan pandangan hidup demokratis yang dikemukakan oleh Nurcholis Madjid (Cak Nun), sebagai berikut:

- a. Pentingnya kesadaran akan pluralisme.
- b. Musyawarah.
- c. Pertimbangan moral.
- d. Pemufakatan yang jujur dan sehat.
- e. Pemenuhan segi-segi ekonomi.
- f. Kerjasama antar warga untuk mempercayai iktikad baik masing-masing.

- g. Pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan pendidikan.

2.2.1.2 Bentuk-bentuk Demokrasi

Menurut Gatara (dalam Rosana, 2016) untuk mengetahui bentuk-bentuk demokrasi, setidaknya dapat diupayakan dengan pendekatan dari berbagai sudut pandang. Misalnya menggunakan 3 sudut pandang utama yakni : *pertama*; dilihat dari sudut pandang “titik tekan” yang menjadi perhatiannya, demokrasi dapat di bedakan antara:

1. Demokrasi *Formal*; yakni demokrasi menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai usaha untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi.
2. Demokrasi *material*; yakni demokrasi yang menekankan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi.
3. Demokrasi gabungan; yakni demokrasi sintesis dari demokrasi formal dan demokrasi material.

Kedua, dari sudut pandang “cara penyaluran” kehendak rakyat, bentuk demokrasi dapat dibedakan antara lain:

1. Demokrasi langsung; yakni rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya di dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat.
2. Demokrasi perwakilan atau demokrasi *representatif*, yakni rakyat menyalurkan kehendaknya, dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam dewan perwakilan rakyat.

3. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, yakni gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan.

Ketiga, dari sudut pandang “tugas-tugas dan hubungan antara alat-alat perlengkapan negara”, demokrasi dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, antara lain:

1. Demokrasi dengan sistem parlementer, yakni dalam demokrasi ini terdapat hubungan erat antara badan legislatif dengan badan eksekutif.
2. Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, yakni demokrasi dalam arti kekuasaan dipisahkan menjadi kekuasaan legislative, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.
3. Demokrasi dengan sistem *referendum*, yakni demokrasi perwakilan dengan kontrol rakyat secara langsung terhadap wakil-wakilnya di dewan perwakilan rakyat. Ada 2 macam referendum yakni “*referendum obligator*” dan “*referendum fakultatif*”.

2.2.1.3 Prinsip-prinsip Demokrasi

Dalam kehidupan manusia, satu jenis harapan selalu mengarah ke jenis harapan yang lain. Kepentingan dan kebutuhan tersebut memunculkan nilai-nilai dan kebijakan yang berkaitan dengan cara nilai-nilai tersebut didistribusikan dalam masyarakat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip demokrasi yang dibahas berkaitan dengan bagaimana kebebasan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan didistribusikan di masyarakat.

Pandangan Robert Dahl (dalam Aliyandi, 2019) tentang lima kriteria demokrasi yang ideal, yaitu:

1. Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat.
2. Partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif.
3. Pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan.
4. Kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda yang harus dan tidak harus diputuskan melalui pemerintahan.
5. Terliputnya masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.

2.2.2 Peran

2.2.2.1 Defisini Peran

Istilah peran dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwara atau film tukang lawak, perangkat tingkah yang dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Peran merupakan suatu patokan atau ukuran yang terdapat alam kehidupan manusia sehingga berfungsi untuk dapat membatasi perilaku dalam tiap-tiap posisi (Suhardono: 2009).

Sedangkan menurut Katz dan Kahn dalam Purnamie Titisari (2014:10) istilah peran merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan berdasarkan karakter dan kedudukannya. Hal tersebut di dasari pada fungsi-fungsi yang dilakukan dalam menunjukkan kedudukan serta karakter setiap manusia yang menjalakkannya. Maka dari itu ketika istilah peran digunkan dalam lingkungan pekerjaan, seseorang yang di beri suatu posisi juga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan yang dimiliki.

Menurut Soerjono soekamto, ada 3 (tiga) macam peran diantaranya:

a) Peran Aktif

Peran aktif yaitu peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut bisa dilihat atau diikuti dari kehadiran dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.

b) Peran Partisipatif

Peran partisipatif yaitu peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu.

c) Peran Pasif

Peran pasif yaitu suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Peran pasif hanya digunakan sebagai symbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

2.2.2.2 Aspek Peran

Biddle dan Thomas dalam (Surlito, 2015:215) berpendapat dalam teori peran :

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial

Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat di bagi dalam dua golongan sebagai berikut:

- a. Aktor (pelaku), yaitu orang yang sedang berperilaku menuruti suatu peran tertentu.
- b. Target (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan prilakunya.

2. Perilaku yang muncul dalam interaksi sosial

Prilaku yang muncul dalam indikator tentang prilaku sebagai berikut:

a. Harapan tentang peran (expectation)

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang prilaku pantas, yang harusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu.

b. Norma (norm)

1. harapan yang bersifat meramalkan (anticipatory), harapan tentang sesuatu yang akan terjadi.
2. harapan normative (role expectation), yaitu keharusan yang menyertai suatu peran.

c. Wujud perilaku dalam peran (performance)

Peran diwujudkan dalam prilaku oleh actor. Wujud prilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda-beda dari suatu actor ke actor lain.

d. Penilaian (evaluation)

Penilaian peran dalam teori peran adalah kesan positif atau negative yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap suatu prilaku yang dilakukan oleh actor.

3. Kedudukan orang-orang dalam prilaku

Kedudukan adalah sekumpulan orang yang secara bersama-sama (kolektif) diakui perbedaannya dari kelompok-kelompok yang lain berdasarkan sifat –sifat yang mereka miliki bersama, prilaku yang sama-sama mereka perbuat, dan reaksi orang-orang lain terhadap mereka.

4. Kaitan antara orang lain dan prilaku

Kaitan orang dengan prilaku kaitan antar orang dengan orang dalam teori peran ini tidak banyak dibicarakan. Kriteria untuk menetapkan kaitan-kaitan tersebut diatas diantaranya yaitu:

- a. Kriteria kesamaan
- b. Konsensus
- c. Konflik peran
- d. Keseragaman
- e. Spesialisasi
- f. Konsistensi

Adapun dimensi peran yang di kemukakan oleh Arimbi (2003:19) sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan
2. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini berpendapat bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan kedudukan dari masyarakat.
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran diidaya gunakan sebagai instrument atau alat untuk mendapat masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsive dan responsible.
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran diidaya gunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau menekan konflik melalui usaha melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi ketidakpercayaan dan kekacauan.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki peran masing-masing dalam kehidupannya sesuai dengan pola hidup dan lingkungannya. Hal ini berate bahwa peran menentukan terhadap perbuatan bagi seseorang. Pentingnya peran adalah dengan adanya peran yang didapatkan dari kedudukan yang bisa menentukan dan mengatur prilaku masyarakat atau orang lain.

2.2.3 Pemilihan Umum

2.2.3.1 Definisi Pemilihan Umum (PEMILU)

Berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dikatakan bahwa: “pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945”.

Pemilu merupakan sistem penjangkaran pejabat publik yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi. Bagi negara yang mengklaim diri sebagai lambing sekaligus tolak ukur utama dari demokrasi. Pelaksanaan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi. Pada dasarnya pemilu sangat penting artinya bagi warga negara, partai politik, dan pemerintah. Bagi pemerintah yang dihasilkan dari pemilu yang jujur, berarti pemerintah itu mendapat dukungan yang sebenarnya dari rakyat, begitu juga sebaliknya Tutik (dalam Harahap, 2019).

Pemilu yang dilaksanakan dalam sebuah negara memiliki arti penting, yaitu:

- a. Pemilu merupakan wujud dari kedaulatan rakyat, yang memilih wakil-wakilnya yang diharapkan mampu memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya.
- b. Dengan pemilu warga negara dapat mengekspresikan hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk hak menyampaikan pendapat, hak berkumpul dan berserikat.
- c. Dengan pemilu dapat membentuk pemerintahan yang memiliki legitimasi (pengakuan dan rakyat).
- d. Dengan pemilu dapat dilakukan pergantian kekuasaan secara teratur dan damai.
- e. Dengan pemilu dapat dilakukan pergantian rekrutmen politik secara terbuka.
- f. Dengan pemilu konflik kepentingan yang ada di masyarakat dipindahkan ke lembaga perwakilan rakyat, sehingga konflik bisa diselesaikan secara terlembaga dan damai.

Dengan pemilu dapat dilakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Sedangkan khusus untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diselenggarakan secara langsung, memiliki dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung yaitu UU Nomor 32 tahun 2004 yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, pasal 55 sampai dengan pasal 119, dan diperjelas dengan PP Nomor 6 tahun 2005 yaitu tentang pertunjuk pemilihan,

pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah (Huwae: 2013)

2.2.4 Pemilihan Kepala Daerah

2.2.4.1 Definisi Pemilihan Kepala Daerah

Setiap daerah di Indonesia pasti memiliki pemimpin diantaranya adalah bupati, gubernur, dan walikota. Pemilihan pemimpin daerah secara langsung oleh rakyat dalam suatu daerah disebut dengan PILKADA. Pemilihan kepala daerah atau yang sering disebut PILKADA atau Pemilukada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah setempat yang sudah memenuhi syarat.

Dengan disahkannya rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pemerintah daerah menjadi UU No. 32 tahun 2004 yang selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, memuat regulasi bersejarah pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Dalam ketentuan tersebut, pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Komisi Pemilihan Umum atau KPU tidak lagi mempunyai hubungan structural dengan KPUD. KPU juga tidak lagi mempunyai otoritas membuat regulasi serta wewenang lain yang selama ini dalam pemilu 2004 baik pemilu legislatif dan pilpres, dinilai sebagai instusi “superbody” (Huwae: 2013)

Pemilhan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah provinsi dan/atau kabupaten kota

berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Secara teknis pelaksanaan Pilkada dibagi menjadi dua tahap kegiatan, yakni masa persiapan dan tahap pelaksanaan.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebenarnya merupakan bagian penting dari kehidupan bangsa Indonesia di era reformasi. Penyelenggaraan pemilihan umum termasuk Pilkada merupakan bentuk implementasi dari demokrasi tidak langsung (indirect democracy). Dalam demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan, pelaksanaan Pilkada bertujuan agar kepala daerah benar-benar bertindak atas nama rakyat, sehingga rakyat harus menentukan pilihannya sendiri melalui pemilu (Marijan dalam Sutrisno, 2017).

Pilkada langsung sebenarnya dimulai setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat 4, mengatur bahwa “Pemilihan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Republik Indonesia”. Namun, setelah adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014, Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih oleh DPR. Setelah terjadi perdebatan public, maka pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang

kemudian disusul dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Itu sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bahwa yang dimaksud dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis (Sutrisno, 2017).

2.2.5 Politik

2.2.5.1 Definisi Politik

Kata politik berkembang sedemikian rupa sehingga diserap ke dalam bahasa kita (bahasa Indonesia) dan memiliki tiga arti yakni “segala kebijaksanaan/tindakan dan urusan, siasat dan sebagainya mengenai pemerintahan suatu negara terhadap negara lain, kelicikan atau tipu

muslihat, dan juga digunakan nama bagi sebuah disiplin pengetahuan yaitu ilmu politik (WJS Poerwadarminta, 2006:24).

Deliar Noer (2001:6) berpendapat bahwa politik adalah segala kegiatan atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan yang bertujuan untuk mempengaruhi dengan mengubah atau mempertahankan suatu struktur sosial tertentu.

Dengan adanya kegiatan-kegiatan politik, Gabriel A. Almond mengungkapkan: “kegiatan politik sebagai fungsi politik dalam dua kategori yaitu fungsi masukan (input function) dan fungsi keluaran (output function). Fungsi masukan adalah fungsi yang sangat penting untuk membuat dan melaksanakan kebijaksanaan dalam sistem politik (Moechtar, 2008:29). Fungsi-fungsi di maksud adalah:

1. Sosialisasi politik

Sosialisasi berarti proses sosial yang memungkinkan seseorang menjadi anggota kelompoknya. Oleh karena itu, ia mempelajari peran dalam kelompok dan budaya kelompok. Oleh karena itu, sosialisasi politik adalah proses sosial yang memungkinkan masyarakat memiliki budaya politik kelompoknya serta bertindak sesuai dengan budaya tersebut. Sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat, seperti masyarakat dan lingkungan kerja, media, rumah dan sekolah, serta lembaga resmi. Oleh karena itu, budaya politik dapat dikembangkan dan dipertahankan hingga generasi berikutnya.

2. Rekrutmen politik

Rekrutmen politik adalah proses pemilihan publik untuk posisi politik dan administratif. Menurut Gabriel A. Almont, Setiap sistem politik memiliki metodenya sendiri dalam merekrut warga untuk memegang posisi politik dan administratif.

3. Artikulasi kepentingan

Fungsi ini merupakan suara dari proses penentuan manfaat yang diharapkan dari sistem politik. Dalam hal ini, masyarakat mengungkapkan kepentingannya kepada lembaga politik dan pemerintahan melalui kelompok kepentingan yang sama, dan terkadang masyarakat mengungkapkan keinginannya secara langsung kepada pejabat pemerintah.

4. Agresi kepentingan

Fungsi ini adalah proses merumuskan alternatif secara jelas dengan menggabungkan atau menyesuaikan kepentingan yang telah ditetapkan atau dengan merekrut kandidat untuk posisi yang sesuai dengan kebijakan tertentu. Agresi kepentingan dapat dilakukan oleh semua subsistem sistem politik, seperti legislatif, birokrasi, administratif, partai politik, media, dan kelompok kepentingan.

5. Komunikasi politik

Fungsi ini adalah alat untuk melakukan fungsi lainnya. Artinya, semua pihak ikut serta dalam sosialisasi politik melalui pertukaran.

Fungsi output meliputi formulasi aturan, eksekusi aturan, dan fungsi pemantauan eksekusi aturan. Ketiga fungsi Gabriel A. Almond ini adalah fungsi pemerintahan. Karena ketidakpastian struktur formal pemerintahan umum di negara non-Barat dan penyimpangan yang besar dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan konstitusional, kami tidak akan membahasnya lebih lanjut. Terkait hal di atas, di sini Almond Mond berpendapat bahwa ditinggalkannya fungsi-fungsi tersebut disebabkan tidak adanya unsur-unsur dasar dalam konsep-konsep yang dikemukakannya, karena fungsi pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari pemahaman politik.

2.2.6 Partai Politik

2.2.6.1 Definisi Partai Politik

Dalam sistem demokrasi, partai politik merupakan alat masyarakat yang penting. Partai politik dapat dijadikan sebagai wadah bagi masyarakat untuk bersaing dan menguasai sistem politik suatu negara dengan menguasai posisi-posisi politik yang ada. Penguasaan posisi politik dicapai melalui mekanisme pemilihan umum yang diikuti oleh partai politik.

Partai politik merupakan organisasi yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya yaitu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, cita-cita, dan nilai-nilai yang sama.

2.2.6.2 Partai politik menurut Para Ahli antara lain:

Menurut Gabriel Almond (Mochtar Mas'ood, 1989:29) yang mendefinisikan partai politik sebagai organisasi manusia dimana didalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi, mempunyai program politik sebagai pencapaian tujuan secara lebih pragmatis sesuai dengan tahapan jangka pendek dan jangka panjang serta mempunyai ciri keinginan untuk berkuasa. Dengan demikian, setiap organisasi yang memenuhi kriteria tersebut dapat diartikan sebagai partai politik.

Menurut Carl J. Friedrich (Miriam Budiharjo, 2002:161), partai politik adalah sekelompok organisasi yang stabil yang bertujuan untuk mengambil dan mempertahankan kendali pemerintahan bagi para pemimpin partai dan untuk menyediakan anggota partai yang ideal berdasarkan pengawasan ini dan manfaat materi.

Sigmund Neuman dalam buku Karyanya "*Modern Political Parties*", mendefinisikan partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan dengan golongan-golongan lain.

Sedangkan menurut Sigit Pamungkas (2011:5), partai politik adalah organisasi yang memperjuangkan nilai-nilai atau ideologi tertentu melalui posisi dominan struktur kekuasaan yang diperoleh dengan mengikuti pemilihan umum.

2.2.6.3 Partai Politik Menurut Undang-Undang

Dalam konteks partai politik di Indonesia sendiri, UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyebut partai politik sebagai suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggotanya. Pada Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan pembentukan partai politik ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

2.2.6.4 Fungsi Partai Politik

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 pasal 11 disebutkan bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana :

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.

- c. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam memuaskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia.
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam perspektif memahami partai politik, terdapat beberapa fungsi partai politik yang tak dapat dipisahkan (UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik) yaitu memberikan pendidikan politik kepada setiap warga negara dan warga negara juga berhak menerima pendidikan tersebut. Misalnya pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik kepada masyarakat, disini partai politik memberikan pendidikan politik secara berkala kepada masyarakat. Dengan adanya pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik, maka masyarakat mulai memahami apa itu politik dan pendidikan politik. Dengan adanya pendidikan politik yang diberikan, maka masyarakat juga akan dapat memberikan partisipasi yang tepat bagi negaranya, seperti berpartisipasi dalam memberikan suara pada pemilihan umum (Masriyani dan Yanti, 2019).

Fungsi partai politik menurut Budiardjo (2008) terbagi menjadi empat yaitu:

- a. Sarana komunikasi politik. Arus informasi dalam suatu Negara bersifat dua arah artinya berjalan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas dan

disinilah kedudukan partai politik dalam arus ini sebagai jembatan antara “mereka yang memerintah” dengan “mereka yang diperintah”.

- b. Sarana sosialisasi politik, sosialisasi politik merupakan suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau dianut oleh suatu Negara, partai, atau organisasi. Proses dimana dimana seseorang memperoleh pandangan, orientasi, dan nilai-nilai dari masyarakat dimana ia berada, proses itu juga mencakup proses dimana masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya.
- c. Sarana rekrutmen politik, proses melalui dimana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik.
- d. Sebagai pengatur konflik, dalam Negara demokratis yang masyarakatnya bersifat terbuka adanya perbedaan dan persaingan pendapat sudah merupakan hal yang wajar. Tetapi dalam masyarakat yang sangat heterogen sifatnya maka perbedaan pendapat ini, apakah ini berdasarkan perbedaan etnis, status, social ekonomi atau agama, mudah sekali mengundang konflik. Pertikaian-pertikaian semacam ini dapat diatasi dengan bantuan partai politik. Sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa, sehingga akibat-akibat negatifnya seminimal mungkin. Namun dipihak lain, dilihat seringkali partai malahan mempertajam pertentangan yang ada.

2.2.7 Pendidikan Politik

2.2.7.1 Definisi Pendidikan Politik

Dalam konsep pendidikan politik terutama terdapat dua konsep yaitu pendidikan dan politik, karena sebelum memaparkan pengertian pendidikan politik perlu dijelaskan pengertian pendidikan dan pengertian politik. Secara etimologis, pendidikan berasal dari bahasa latin educare yang berarti pelatihan. Dalam bidang pertanian dikenal istilah educare yang artinya menyuburkan atau mengolah tanah agar subur. Dalam pengertian ini, pendidikan adalah suatu proses yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan, perkembangan, kedewasaan, organisasi dan orientasi.

Ada hubungan erat antara pendidikan dan politik, bahkan bisa dikatakan tidak ada pendidikan tanpa orientasi politik. Lembaga dan proses pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat suatu negara. Begitu pula sebaliknya, sistem dan proses politik akan mempengaruhi karakteristik pendidikan suatu negara. Hubungan antara pendidikan dan politik bersifat empiris dan telah ada sejak awal perkembangan peradaban manusia. Misalnya, Plato melihat sekolah sebagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan sistem politik (Sirozi, 2005).

Pendidikan politik bukanlah perpaduan antara pendidikan dan politik. Pentingnya pendidikan politik jauh melampaui ini. Pendidikan politik merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa, yang bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan pribadi, menjadikan diri individu yang

mandiri dan otonom, serta mengembangkan dimensi sosialnya sesuai dengan status kewarganegaraannya. Adapun juga mengaktualisasikan diri dapat ditafsirkan sebagai mengaktualisasikan bakat dan kemampuan, sehingga pribadi individu bisa berkembang dan menjadi aktif dan kreatif dalam berkarya. Holder dan Zakhrachenko (2002) menyebut pendidikan politik sebagai pendidikan publik, yaitu upaya melibatkan warga negara dalam masyarakat untuk menciptakan budaya partisipasi.

Pendidikan politik dapat menghasilkan budaya politik yang sehat, dan pada akhirnya berhasil mewujudkan masyarakat yang demokratis dan tidak memihak. Politik yang sehat tidak diragukan lagi merupakan prasyarat terpenting bagi masyarakat demokratis seperti itu. Karena jika politik tidak sehat, maka masyarakat atau demokrasi yang demokratis tentu saja akan kehilangan arah, sehingga terjadi kebebasan yang tidak terkendali yang melanggar demokrasi itu sendiri. Inilah makna sebenarnya dari pendidikan politik sebagai upaya penguatan masyarakat demokratis dalam rangka demokrasi yang berkelanjutan (Prabowo dalam Kamal, 2017)

Ruslan (2000) mengartikan pendidikan politik sebagai upaya yang didedikasikan untuk lembaga pendidikan formal dan non-formal, yang bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan kepribadian politik sesuai dengan budaya politik setiap warga negara yang bekerja di lembaga tersebut. , Membentuk dan meningkatkan kesadaran politik setiap orang di semua tingkatan, menyadarkan warga negara dan mampu memperoleh

kesadarannya sendiri, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik, dan berpartisipasi sebesar-besarnya dalam memecahkan masalah bersama dalam masyarakat . Berpartisipasi dan mengarah pada perubahan yang lebih baik.

Usman Abdul Mu'iz (2000) mengungkapkan tujuan politik, yaitu membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik, agar terbentuknya kemampuan dalam mengikutsertakan individunya untuk bisa berpartisipasi politik dalam bentuk yang positif, ikut serta dalam memecahkan persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat sehingga bisa berdampak pada perubahan social yang lebih baik.

2.2.7.2 Fungsi pendidikan politik

Pendidikan politik memiliki dua fungsi utama, yang satu mengubah atau membentuk perilaku pribadi seorang individu dan yang lainnya merupakan fungsi yang lebih luas, yaitu membentuk tatanan sosial yang ideal sesuai dengan kebutuhan politik. Menurut Kartono (2008: 57) bahwa pendidikan politik dapat memberikan sumbangan besar bagi :

- 1) Proses demokrasi yang semakin maju dari semua individu (rakyat) dan masyarakat/struktur kemasyarakatan.
- 2) Dengan prinsip-prinsip realistik, lebih manusiawi, dan berlandaskan.
- 3) Hukum formal dalam menggalang komunikasi politik yang modern.

Fungsi pendidikan politik di atas menekankan bahwa fungsinya mengubah tatanan sosial menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan cirinya

adalah mengubah sikap individu-individu dalam masyarakat, yang lebih kondusif bagi proses demokrasi. Menurut Kartono (2008:59), pengaruh pendidikan terhadap individu itu sendiri adalah::

- 1) Peningkatan kemampuan individual supaya setiap orang mampu berpacu dalam lalu lintas kemasyarakatan yang menjadi semakin padat penuh sesak dan terpolusi oleh dampak bermacam-macam penyakit sosial kedurajatan,
- 2) Disamping mengenai kekuasaan, memahami mekanismenya, ikut mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan kekuasaan di tengah masyarakat.

Fungsi pendidikan politik bagi individu diatas intinya ialah bahwa pendidikan politik berusaha merubah aspek kognitif, efektif dan psikomotor dari individu. Kartaprawira (2004: 54) memandang pendidikan politik sebagai salah satu fungsi struktur politik dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Dalam kaitannya itu Affandi (2011: 27) mengatakan bahwa pendidikan politik melalui partisipasinya dalam menyalurkan tuntutan dan dukungan.

Menurut Edwin (2015) secara lebih luas pendidikan politik diharapkan dapat berfungsi sebagai berikut :

1. Pendidikan politik sebagai pembentukan karakter bangsa

Dengan kata pendidikan mengandung suatu tindakan manusiawi yakni suatu tindakan yang bermaksud untuk mengubah pikiran, sikap, dan perilaku manusia ke arah yang menunjukkan kedewasaan. Soemantri dalam Hermawan (2011: 71) menjelaskan bahwa pendidikan politik yang mengarah pada pembentukan karakter bangsa merupakan awal bagi suatu bangsa yang memperoleh kemerdekaan. Pendidikan politik dalam pembentukan karakter bangsa juga di tegaskan dalam UU RI No 2 Tahun 2008.

2. Pendidikan politik sebagai pembangun kesadaran berpolitik

Hal ini juga disebutkan dalam UU No.2 Tahun 2008 bahwa tujuan parpol adalah meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat, dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Membangun kesadaran berpolitik maksudnya adalah proses penyadaran warga negara tentang hak dan kewajibannya.

3. Pendidikan politik sebagai pembinaan kader parpol

Dalam upaya melahirkan kader parpol yang handal dan berkualitas memang diperlukan system pengkaderan yang efektif dan produktif. Pendidikan politik sangat strategis dalam kerangka pembinaan tersebut. Firmanzah dalam Hermawan (2011: 72) menyoroti tentang peran dan fungsi parpol dapat dibedakan menjadi dua, pertama peran dan tugas internal organisasi dan kedua parpol juga mengemban tugas yang lebih bersifat eksternal organisasi.

4. Pendidikan politik sebagai penanaman ideologi bangsa

Setiap parpol memiliki ideologi yang dianutnya. Baik itu ideologi keagamaan, kebangsaan, kekaryaan, komunisme. Ideologi yang dianut oleh parpol sangat penting karena menggambarkan visi, misi, dan tujuan parpol yang ingin dicapai. Ideologi dalam kaitan politik atau dikenal dengan ideologi politik adalah suatu perumusan keyakinan atau program yang dimiliki oleh suatu negara, suatu bangsa, partai politik atau perkumpulan politik lain yang bermaksud mencapai tujuan politik yang khusus.

Kemudian, kebijakan lain yang berkaitan dengan pendidikan politik juga terdapat pada permendagri No. 36 Tahun 2010 tentang pedoman fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik. Pada permendagri ini dijelaskan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik dapat diberikan terhadap kegiatan, antara lain:

- a. Seminar dan lokakarya
- b. Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan:
- c. Asistensi, pelatihan, bimbingan teknis
- d. Pagelaran seni dan budaya
- e. Jambore, perkemahan, napak tilas, dan
- f. Berbagai macam perlombaan seperti pidato, jalan sehat, cerdas tangkas, karya tulis ilmiah, film documenter, dan cipta lagu.

2.2.7.3 Tujuan Pendidikan Politik

Salah satu tujuan dasar pendidikan politik adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga segala bentuk pendidikan tidak terlepas dari misi tersebut. Menurut Alfian (dalam Ahyana, 2009), pendidikan politik adalah upaya sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik suatu masyarakat agar dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik ideal yang akan didirikan.

Secara umum pendidikan politik yang diselenggarakan oleh negara bertujuan untuk membina generasi penerus sebagai penerima dan penerus sistem nilai (model kepercayaan, sistem budaya, dan sistem politik), yang disamakan dengan sistem nilai yang dapat membimbing negara. Aktivitas kehidupan memperkuat sikap jiwa dalam sistem nilai agama yang diterapkan dan keinginan untuk mempertahankan sistem nilai (Soemarno, 2002).

Dalam kerangka ini, tujuan pendidikan politik sangat jelas, untuk membentuk kepribadian politik dan kesadaran politik, serta membentuk kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam politik, sehingga individu tersebut menjadi peserta politik yang aktif di masa depan. Dengan demikian secara jelas diatur dalam Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 bahwa proses pendidikan politik bertujuan untuk mengetahui juga memahami kewajiban, hak dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

2.2.7.4 Bentuk Pendidikan Politik

Pendidikan politik tentunya tidak akan terlaksana tanpa adanya penyelenggaraan yang dilakukan secara konkret di lapangan atau di tengah-tengah masyarakat. Menurut Kuntowijoyo (1994: 58) mengemukakan tentang bentuk pendidikan politik, yakni (1) pendidikan formal yakni pendidikan politik yang diselenggarakan melalui indoktrinasi, (2) pendidikan pendidikan politik yang dilakukan secara nonformal melalui pertukara mimbar bebas. Pendidikan politik yang baik memobilisasi simbol-simbol nasional, seperti sejarah, seni sastra, dan bahasa.

Menurut Rusadi Kantaprawira (2004:56) bentuk-bentuk pendidikan politik dapat dilakukan melalui:

1. Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum.
2. Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media).
3. Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja menyampaikan khotbah, lembaga pendidikan formal maupun informal.

2.2.7.5 Faktor yang mempengaruhi pendidikan politik

Pendidikan politik sangat berpengaruh terhadap individu seseorang maupun lingkungan sosial. Bagiamanapun sebagai warga negara yang baik kita dituntut agar peka terhadap persoalan-persoalan bangsa, oleh sebab itu pendidikan politik akan bisa menuntut masyarakat lebih aktif serta menumbuhkan minat yang tinggi untuk ikut berpartisipasi pada kontestasi-

kontestasi politik. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan politik menurut Kartini Kartono, 2009 (dalam Kusuma, 2019):

1. Faktor Individu

- a. Apatisme dan sinisme politik, yang cenderung menjadi sikap putus asa itu mengakibatkan rakyat sulit mempercayai edukatif dan gerakan-gerakan politik yang dianggap palsu dan menina-bobokan belaka.
- b. Rendahnya latar belakang pendidikan, yang kebanyakan rakyat belum memahami kompleksitas sosial dan politik disekitar dirinya.

2. Faktor Lingkungan

- a. Money politik, sebagaimana pendidikan politik bisa menghindari masyarakat dari politik uang, sehingga bisa berperan dan berpartisipasi secara proporsional menurut hati nurani setiap individu dalam memilih kontestan politik dalam kontestasi politik.
- b. Kampanye hitam (*Black Campige*), bagaimana pendidikan politik bisa meminimalisir keikutsertaan masyarakat akan hal-hal negatif pada kontestasi politik seperti kampanye hitam, yang dimana bisa merusak moran dan etika dari politik itu sendiri.

2.2.8 Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik

Partai politik merupakan salah satu institusi inti dan demokrasi modern. Demokrasi modern mengadakan sebuah sistem yang disebut keterwakilan, baik keterwakilan lembaga formal kenegaraan seperti (DPR, DPRD) maupun keterwakilan aspirasi masyarakat dalam instutusi

kepartaian. Partai politik seharusnya melaksanakan fungsinya dengan baik sehingga dapat menjadikan suatu negara yang demokratis, tetapi pada kenyataannya tidak semua fungsi partai tersebut dilaksanakan oleh partai-partai politik yang ada. Mengingat fungsi partai politik yang begitu penting, sering bahkan keberadaan dan kinerjanya merupakan ukuran mutlak bagaimana demokrasi berkembang disuatu negara. Meskipun ia bukan merupakan pelaksana dan suatu pemerintahan, namun keberadaannya akan mempengaruhi bagaimana dan arah mana pelaksanaan pemerintahan dijalankan. Pendidikan politik yang dilaksanakan partai politik antara lain ialah berpartisipasi secara aktif dan kreatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sadar akan hak dan kewajiban suatu tanggung jawabnya sebagai warga negara terhadap kepentingan bangsa dan negara. Dengan demikian pendidikan politik akan menjadi sarana, terpeliharanya stabilitas nasional guna memperlancar usaha melalui pembangunan (Pasaribu, 2017).

Menurut Labolo dan Ilham (2015), Proses pendidikan politik dapat dilaksanakan melalui kegiatan seperti kursus, pelatihan kepemimpinan, diskusi dan seminar, serta partisipasi dalam konferensi dan forum. Selain itu, pendidikan politik juga harus menunjukkan bagaimana merumuskan kebijakan yang sehat, bersaing secara adil, dan mengajarkan masyarakat untuk mengikuti aturan.. Partai politik wajib melakukan pendidikan politik kepada aparaturnya pemerintahan, kader dan masyarakat. Dalam proses pendidikan politik, parpol harus memperhatikan beberapa aspek, antara lain:

1. Materi Pendidikan

Dalam proses pendidikan politik kader dan kader partai dan pemerintahan, materi yang diberikan lebih kepada penguatan dan pengembangan program partai, peningkatan loyalitas dan dedikasi kader, serta peningkatan kualitas kader agar berfikir ke depan.

Materi yang disampaikan kepada masyarakat dalam mata kuliah pendidikan politik meliputi kedudukan, hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, serta konstitusi nasional.

2. Metode Pendidikan

Dari uraian di atas, terlihat bahwa buku teks pendidikan politik untuk partai dan kader pemerintah dan massa berbeda. Ini adalah metode yang digunakan untuk mengangkut bahan juga berbeda.

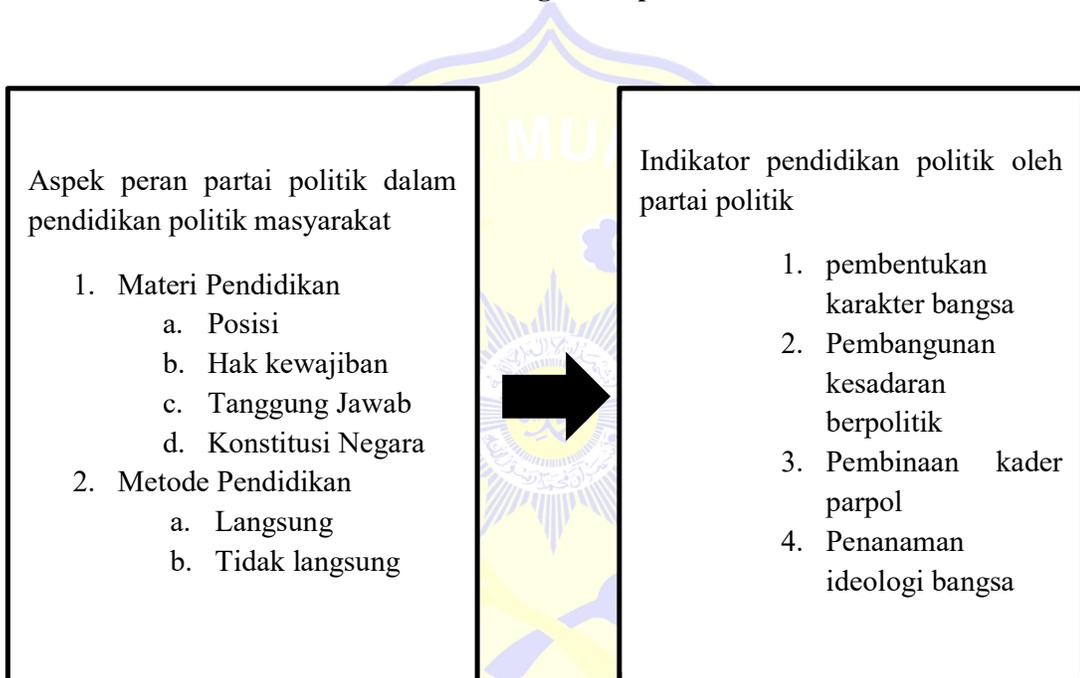
3. Tujuan pendidikan

Tujuan partai politik memberikan pendidikan politik bagi kader dan pengurus partai adalah untuk meningkatkan solidaritas politik dalam menjaga serta memelihara integritas bangsa, memberikan pengetahuan tentang tugas, fungsi, hak dan kewajiban partai politik, dan untuk meningkatkan kapasitas kader dan pengurus partai. Kemudian tujuan partai politik memberikan pendidikan politik kepada masyarakat adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2.3 Kerangka Berpikir

Setiap penelitian pasti diperlukan kerangka berpikir sebagai pijakan atau sebagai pedoman dalam menentukan arah penelitiannya, hal ini diperlukan agar penelitian tetap berfokus pada kajian yang akan diteliti. Alur kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Peneliti



2.4 Definisi Konseptual

1. Peran

Menurut Katz dan Kahn dalam Purnamie Titisari (2014:10) istilah peran merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan berdasarkan karakter dan kedudukannya. Hal tersebut di dasari pada fungsi-fungsi yang dilakukan dalam menunjukkan kedudukan serta

karakter setiap manusia yang menjalankannya. Maka dari itu ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, seseorang yang di beri suatu posisi juga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan yang dimiliki.

2. Partai Politik

Partai politik merupakan organisasi yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya yaitu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, cita-cita, dan nilai-nilai yang sama.

. Dalam proses pendidikan politik ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh partai politik antara lain:

1. Materi Pendidikan

Materi yang disampaikan dalam proses pendidikan politik kader dan pimpinan partai lebih difokuskan pada penguatan dan pengembangan program partai, peningkatan loyalitas dan pengorbanan kader, serta peningkatan kualitas kader agar dapat berpikir futuristic.

2. Metode Pendidikan

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa materi pendidikan politik yang disampaikan kepada kader pengurus partai maupun masyarakat berdeda dan metode yang digunakan untuk menyampaikan materi tersebut juga berbeda. Cara penyampaian materi digunakan untuk menyampaikan materi kepada kader dan

pengurus partai adalah penyampaian yang intensif secara langsung untuk membentuk *mindset* mereka agar memiliki loyalitas dan integritas kepada partainya.

2.5 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah informasi ilmiah yang membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variable yang sama, selain itu definisi operasional juga sebagai aspek penelitian yang memberikan kepada kita tentang bagaimana cara mengukur variable. Adapun definisi operasional peneliti sebagai berikut:

- a. Aspek peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik
 1. Materi Pendidikan
 - a. Posisi
 - b. Hak kewajiban
 - c. Tanggung Jawab
 - d. Konstitusi Negara
 2. Metode Pendidikan
 - a. Langsung
 - b. Tidak langsung
 3. Indikator pendidikan politik oleh partai politik
 1. Pembentukan Karakter Bangsa
 2. Pembangunan Kesadaran Berpolitik
 3. Pembinaan Kader Parpol
 4. Penanaman Ideologi Bangsa

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada kualitas atau yang terpenting dari sifat produk/jasa. Hal terpenting tentang barang atau jasa berupa peristiwa/fenomena/gejala sosial adalah makna di balik peristiwa tersebut, yang dapat dijadikan pengalaman berharga bagi pengembangan konsep teoritis. Jangan lewatkan hal-hal yang berharga tanpa meninggalkan manfaat. Penelitian kualitatif dapat dirancang untuk berkontribusi pada teori, praktik, kebijakan, masalah sosial, dan tindakan (Satori dan Komariah, 2017).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang Pendidikan Politik Menjelang Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kota Mataram Oleh DPD Partai Golkar Kota Mataram. Disamping itu juga akan dibahas tentang apa saja indikator DPD Partai Golkar kota Mataram dalam pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat kota Mataram.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar kota Mataram, dan penelitian ini dilaksanakan selama peneliti mendapatkan izin dari pihak terkait untuk melakukan penelitian dan berakhir setelah penelitian peneliti selesai. Peneliti memilih lokasi penelitian

berdasarkan bahwa situs tersebut merupakan situs yang sangat cocok untuk memperoleh informasi atau memperoleh data yang akurat dan relevan terkait dengan pertanyaan penelitian yang ada.

3.3 Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian sangat penting dalam suatu penelitian karena harus membatasi studi dengan permasalahan yang akan diteliti. Fokus penelitian sangat erat kaitannya dengan situasi dan kondisi yang diharapkan oleh peneliti di lapangan. Sehingga fokus penelitian besar kemungkinan berubah berdasarkan situasi dan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Adapun fokus penelitian ini yaitu berkaitan dengan : “bagaimana peran DPD Partai Golkar dalam memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat menjelang pilkada 2020 serta indikatornya”.

3.4 Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah orang-orang, peristiwa, dokumen-dokumen dianggap penting. Ida Bagus Netra (dalam skripsi Amrullah 2015) merangkan bahwa sumber data dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data merupakan bahan mentah yang diolah, data tidak ada arti jika tidak diolah.

Sesuai dengan apa yang sudah diungkapkan oleh Ida Bagus Netra maka untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, penelitian ini akan membagi jenis data menjadi dua yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data yang di peroleh secara langsung melalui wawancara dengan informan yang terlibat langsung dengan pemegang program.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari obyek penelitian. Data ini bersumber dari data penelitian yang telah ada misalnya dokumen-dokumen.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data meliputi:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena social dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pnelitian (Soemitro, 2008:62). Dalam penelitian ini, yaitu mengenai peran DPD Partai Golkar Kota Mataram terhadap pelaksanaan pendidikan politik masyarakat menjelang pilkada serentak 2020 di kota Mataram.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data, yaitu memperoleh informasi langsung dari sumber data melalui dialog atau tanya jawab. Wawancara penelitian kualitatif bersifat mendalam karena ingin menggali informasi secara komprehensif dan jelas dari informan (Djam`an dan Aan, 2009).

Responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	NAMA	JABATAN
1	H. Mohan Roliskana	Ketua dewan pimpinan daerah
2	Usman TS, SE	Sekretaris
3	H. Munawir, S. Ag	Bagian Pendidikan dan Cendikiawan
4	Kader Partai Golkar	Anggota

3. Dokumentasi

Teknik dokumenter yang menampilkan data langsung dari lokasi penelitian, antara lain buku terkait, peraturan, laporan kegiatan, foto, dan dokumenter (Ridwan, 2008: 77).

3.6 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif, berbagai teknik pengumpulan data (triangulasi) digunakan untuk memperoleh data dari berbagai sumber dan dilanjutkan sampai data tersebut jenuh. Pengamatan terus menerus menghasilkan satu bagian data. Data yang diperoleh umumnya merupakan data kualitatif, sehingga teknologi analisis data yang digunakan tidak memiliki model yang jelas. Sugiyono, 2013 (dalam artikel Kusuma, 2019).

Dalam penelitian ini, teknologi analisis data merupakan teknologi kualitatif, mengikuti proses aktivitas Miles dan Humberman (1984) dalam Sugiyono, 2013: 246252 (dalam tesis Kusuma, 2019). Terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang membutuhkan IQ tinggi, keluasan, dan kedalaman wawancara. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, menemukan peralatan dan pola. Oleh karena itu, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan dan mencari data tambahan bila diperlukan. Dengan menyediakan aspek-aspek tertentu dari kode, perangkat elektronik seperti komputer kecil dapat digunakan untuk membantu penyederhanaan data.

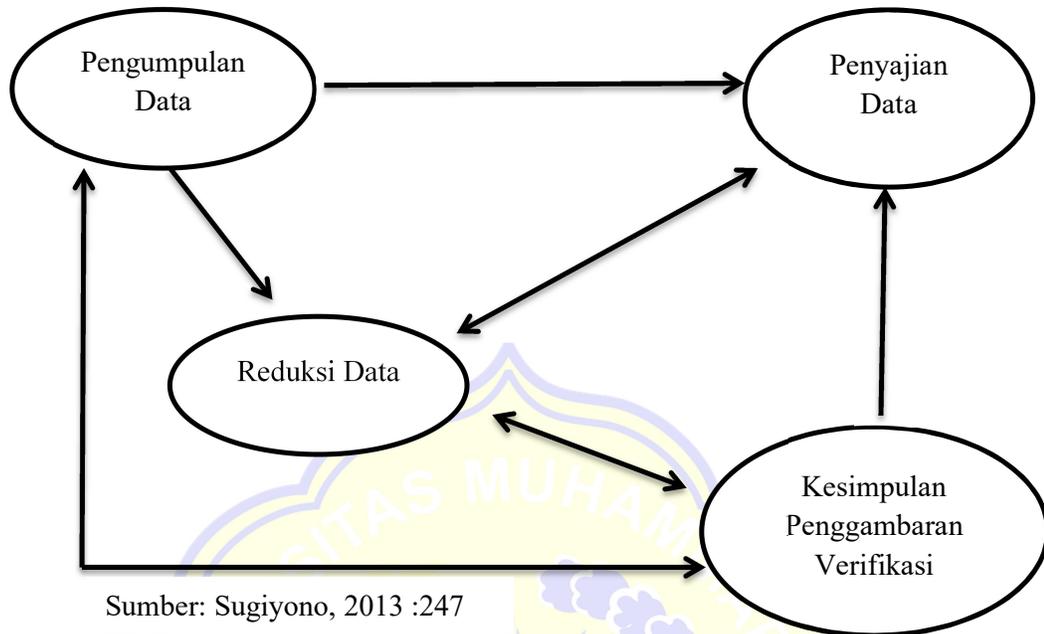
2. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, dan diagram alir. Dalam hal ini, data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks deskriptif.

3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ada bukti yang meyakinkan, termasuk pola pengumpulan data pada tahap selanjutnya. Namun, jika peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data dan kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang diajukan adalah kesimpulan yang kredibel. Tujuan penggunaan grafik dan teks adalah untuk memberikan kesan mudah mengungkapkan makna Sugiyono (2014) dalam karya tulis (Kusuma, 2019).

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam bagan dibawah ini:



3.7 Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahian (validitas) dan keandalan (reabilitas) menurut versi positivisme yang disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigma sendiri Moleong (2002) (dalam skripsi Amrullah, 2015).

Dalam menguji keabsahan data yang ada, maka dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa metode menurut Djam'an dan Aan, (2009) :

1. Triangulasi Sumber

Cara meningkatkan kepercayaan penelitian adalah dengan mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain. Peneliti perlu melakukan eksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari beragam sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknis adalah penggunaan berbagai teknik penyebaran data dalam sumber data. Teknik triangulasi digunakan untuk menguji kredibilitas data, yaitu teknik yang berbeda digunakan untuk memverifikasi data dari sumber yang sama.

3. Triangulasi Waktu

Peneliti dapat mengecek konsistensi, kedalaman dan ketepatan/kebenaran suatu data dengan melakukan triangulasi waktu. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda untuk menguji kredibilitas data.

